

ABSTRAK

Nama : Amany
NIM : 2170110011
Judul Tesis : **IDENTITAS HUKUM DALAM PRAKTIK UTANG PIUTANG ANTAR INDIVIDU UNTUK MODAL USAHA DI DESA PASANGGRAHAN KECAMATAN SUKAWENING KABUPATEN GARUT**

Penelitian ini mengkaji mengenai identitas hukum dalam praktik utang piutang antar individu untuk modal usaha yang terjadi di Desa Pasanggrahan, kecamatan Sukawening Kabupaten Garut, dengan mengusung tiga permasalahan yakni: kepastian, kemanfaat serta keadilan di dalam praktik tersebut. Kepastian berkaitan dengan azas kebenaran, yakni sesuatu yang dapat disilogismekan dengan cara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif diposisikan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa yang konkret dijadikan premis minor. Melalui sistem logika tertutup, otomatis akan diperoleh konklusinya, sehingga semua orang diwajibkan berpegang teguh padanya. Dengan pegangan itulah masyarakat dapat menjadi tertib. Karena dengan kepastian masyarakat dapat diarahkan pada ketertiban. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris, guna mengetahui bagaimana hukum yang berlaku pada masyarakat di Desa Pasanggrahan terkait praktik utang piutang antar individu untuk modal usaha. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Fakta yang terjadi ditelaah melalui aspek yuridis-normatif menggunakan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah hukum Islam. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami pola interaksi sosial yang terjadi pada warga Desa Pasanggrahan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa praktik utang piutang antar individu untuk modal usaha di Desa Pasanggrahan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam utang piutang menurut hukum ekonomi Islam atau yang disebut dengan *al-Qardh*. Begitu pula dengan ketentuan yang ada dalam akad kerjasama bagi hasil atau *mudharabah* dalam Islam, praktik tambahan yang disebut sebagai “bagi hasil” dalam praktik yang terjadi di desa ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam *mudharabah*. Selanjutnya, dikarenakan praktik ini hanya dilakukan dibawah tangan, maka tidak tercapai sebuah kepastian hukum yang semestinya ada agar dapat memperoleh kemanfaatan serta keadilan yang sesungguhnya. Karena praktik yang dilakukan tidak cukup dengan kenyamanan saja, namun juga harus terpenuhinya keamanan bagi masyarakat.

Kata Kunci: ***Kepastian, kemanfaatan, keadilan***